



# LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA DENPASAR

GAJAH MADA NOMOR 1 DENPASAR

OLEH:

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

CeK sah dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-19478daf0389e8a3314a6a695aaaefce3\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-19478daf0389e8a3314a6a695aaaefce3_conv.pdf)



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

### **D. Ruang Lingkup**

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Sekretariat Daerah Kota Denpasar dilakukan terhadap penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2025.

## **BAB II**

### **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

##### **1) Penetapan Konteks Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengacu pada:**

1. Misi ketiga yaitu Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Arah kebijakan yang ditempuh terdiri dari 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum, Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Perekonomian Dan Pembangunan.

Pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Denpasar menetapkan 1 terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu;

- a. 1 Tujuan strategis, 1 Sasaran strategis, 1 IKU strategis dan 3 Program yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam lampiran 1 (form 2.b)

##### **2) Penetapan konteks operasional Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengacu pada:**

- a. 3 Program, 15 Kegiatan dan 20 Keluaran/hasil yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2 (Form 2.c.1, Form 2.c.2, Form 2.c.3)

#### **B. Hasil Identifikasi Risiko**

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Sekretariat Daerah Kota Denpasar memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) dapat disajikan dalam lampiran 3 (form 3.b dan 3.c )

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 14 risiko dari populasi.

Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat dikendalikan (*controllable*) sebanyak 0 buah dari total risiko strategis pemda dan

jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) sebanyak 0 buah dari total risiko strategis pemda.

### **C. Hasil Analisis Risiko**

Dari 14 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 risiko 0 % dari 14 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 4 (form 5 MR).

### **D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan**

Seluruh risiko prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada Lampiran 5 (Form 7).

### **E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Sebanyak 0 risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0 % dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada form 7.

### **BAB III**

#### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Sebanyak 0 risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dari total 14 risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada lampiran 7 (Form 8).

#### **BAB IV RANCANGAN PEMANTAUAN**

Tidak ada pengendalian yang dibutuhkan untuk dirancang mekanisme pemantauan dalam memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam lampiran 8 (Form 9)

## **BAB V PENUTUP**

Pelaksanaan pengelolaan risiko yang berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju serta pembangunan secara berkelanjutan. Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki sasaran strategis dimana mengoptimalkan tata kelola Pemerintah Kota Denpasar baik di bidang Pelayanan Kepemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta bidang Pelayanan Administrasi Umum yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama melalui Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintah. Strategi dari tindak lanjut pengelolaan risiko adalah dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala ke bidang-bidang teknis yang mengampu kinerja Sekretariat Daerah guna meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja Kota Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2026

**Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh**  
Pj, Sekretaris Daerah Kota Denpasar



**Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680924 199303 1 010

## Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
Sumber Data	Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	<b>Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kota Denpasar</b>		
Sasaran Strategis	<b>Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)</b>		
IKU Renstra Setda	No		Target
	.	Nama IKU Setda	
	1.	<b>Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah</b>	100%
Program	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
	2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan strategis:</b>		
	<b>1. Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kota Denpasar</b>		
	<b>Sasaran Strategis:</b>		
	<b>1. Meningkatkan Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)</b>		
<b>IKU Strategis:</b>			
<b>1. Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah</b>			
Program:			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
3. Program Perekonomian dan Pembangunan			

## LAMPIRAN 2

Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD		Form 2.c																																										
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali																																										
Penilaian Tahun	:	2025																																										
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026																																										
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																																										
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat Daerah Kota Denpasar																																										
Sumber Data	:	Renja Tahun 2025																																										
Tujuan Strategis	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar																																										
Program	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b></li> <li>2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>3. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> </ol>																																										
Keluaran/ Hasil Kegiatan	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 85%;">Nama Keluaran/Hasil Kegiatan</th> <th style="width: 10%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>185 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</td> <td>14 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>24 Laporan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>166 Unit</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td> <td>18 Unit</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>142 Unit</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td>3 Unit</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</td> <td>2 Orang/Bulan</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</td> <td>8 Orang</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</td> <td>2 Orang/Bulan</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</td> <td>17 Paket</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	1	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan	100%	2	Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya	100%	3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	4	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	5	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	6	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	7	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	8	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	9	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	12	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	13	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket
No.	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target																																										
1	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan	100%																																										
2	Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya	100%																																										
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan																																										
4	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen																																										
5	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan																																										
6	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit																																										
7	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit																																										
8	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit																																										
9	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit																																										
10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan																																										
11	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang																																										
12	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan																																										
13	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket																																										
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	:	<p>Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>5. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>6. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</li> <li>7. Kegiatan Penataan Organisasi</li> <li>8. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> </ol> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</li> <li>3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> <li>4. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</li> <li>5. Jumlah Mebel yang Dipelihara</li> <li>6. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</li> <li>7. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</li> <li>8. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>9. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>10. Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>11. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</li> <li>12. Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya</li> <li>13. Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan</li> </ol>																																										

## Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
Sumber Data	Renja Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kota Denpasar		
Program	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
	2.	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	
	3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No.	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%
	2	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
	3	Persentase Produk Hukum yang Harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100%
	4	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Kegiatan:		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</li> <li>2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li> <li>4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</li> </ol>		
Keluaran/Hasil Kegiatan:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai LPPD</li> <li>2. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>3. Presentase Produk Hukum yang Harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM</li> <li>4. Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah</li> </ol>			

## Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
Sumber Data	Renja Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kota Denpasar		
Program	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
	2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	3.	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No.	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%
	2	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindaklanjuti	100%
	3	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Perekonomian dan Pembangunan		
	Kegiatan: 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Kegiatan Administrasi Pembangunan 3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti 2. Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran 3. Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindaklanjuti		

### LAMPIRAN 3

Form 3.b

#### Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali
Nama OPD	: Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar
Urutan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
<b>Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar</b>										
<b>Sasaran Startegis Setda Kota Denpasar: Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)</b>										
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administrasi umum	RSO.25.33.02.01	Asisten Administrasi Umum	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administrasi umum	Internal dan Eksternal	C	Pelayanan administrasi umum belum optimal	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indikator Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: 1. Nilai LPPD 2. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase Produk Hukum Yang Harmoni Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan HAM 4. Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif pemerintahan dan kesejahteraan	RSO.25.33.02.02	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Internal dan Eksternal	C	Pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat belum optimal	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indikator Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan: 1. Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindak Lanjuti 2. Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran 3. Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif perekonomian dan pembangunan	RSO.25.33.02.03	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif perekonomian dan pembangunan	Internal dan Eksternal	C	Pelayanan perekonomian dan pembangunan belum optimal	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Form 3.c

Nama Pemda : Kota Denpasar, Provinsi Bali  
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai : 1 Januari - 31 Desember 2025  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar  
 Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)  
 Urusan Pemerintahan : Urus Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Monitoring / Evaluasi	Munculnya pemberitaan yang negatif tentang Pemerintah Kota Denpasar di Media Massa	ROO.25.33.02.1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Disebabkan oleh opini beragam dari pihak-pihak lain	Eksternal	C	Terjadinya penurunan kepercayaan dan keselahan persepsi masyarakat kepada Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar
				Penilaian rekanan / penyedia barang dan jasa telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hubungan kedekatan	RF.25.33.02.1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Penyusunan Laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.33.02.2	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 2. Kurangnya koordinasi antar bidang / pegawai/ pejabat berwenang	Internal	C	Realisasi anggaran yang tidak terserap	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.3	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penantauan dan Evaluasi	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terlambat dan tidak sesuai	ROO.25.33.02.2	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	1. Kurangnya Koordinasi 2. PD belum memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Unsur pelayanan yang terendah belum	Internal dan Eksternal	C	Tidak tersusumnya Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah
				Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.4	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Kurangnya koordinasi antar bidang / pegawai/ pejabat berwenang	Internal dan Eksternal	C	Realisasi anggaran yang tidak terserap	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah
				Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.5	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Adanya intervensi dalam proses verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.6	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Pertanggung jawaban	Kerusakan pada bangunan gedung rumah jabatan dan gedung kantor Sekretariat Daerah	ROO.25.33.02.3	Bagian Umum	Tidak terpeliharanya gedung bangunan rumah jabatan dan gedung kantor	Eksternal	UC	Mengganggu jalannya operasional rumah tangga / perkantoran	Pimpinan dan Pegawai
				Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi	RF.25.33.02.7	Kabag Umum, PPK, PPTK dan Staf Perencanaan	Adanya benturan kepentingan dalam penyusunan DPA/RKA	Internal	C	Perangkat Daerah gagal dalam menjalankan program dan kegiatan, adanya permasalahan hukum	Bagian Umum
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.8	Kabag Umum, PPK, PPTK dan Staf Perencanaan	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian Umum
				Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	RF.25.33.02.9	Kabag Umum, PPK, PPTK dan Staf Perencanaan	Pengujian pertanggungjawaban baru sebatas pengujian administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan keuangan negara	Bagian Umum
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan	Kurangnya komitmen OPD dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dan MoU Sister City	ROO.25.33.02.4	Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	kurangnya komitmen OPD dalam menindak lanjut Kesepakatan Bersama dan MoU Sister City	Eksternal	C	Tidak optimalnya pelaksanaan kerja sama Daerah	Bag Kerjasama, OPD yang melakukan tindak lanjut kerja sama
				Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.33.02.10	Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan. 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan. 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bag Kerjasama
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.11	Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bag Kerjasama
5	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelaksanaan	Tidak tersusumnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	ROO.25.33.02.5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Kurangnya koordinasi ketersediaan dokumen pendukung dari Perangkat Daerah terkait	Internal dan Eksternal	C	Tidak tersusumnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kepala Daerah Kepala Bagian Tata Pemerintahan
				Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.12	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Kurangnya koordinasi antar bidang / pegawai/ pejabat berwenang	Internal	C	Realisasi anggaran yang tidak terserap	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
				Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.13	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Adanya intervensi dalam proses verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.14	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

6	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Pelaksanaan	Ranperda dan Ranperwali yang dibahas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	ROO.25.33.02.6	Kepala Bagian Hukum	Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah tentang Produk Hukum dan HAM serta kesadaran Hukum Masyarakat	Eksternal	C	Produk Hukum yang tidak memenuhi standar filosofis, yuridis dan sosiologis.	Kepala Bagian Hukum
				Kurang cermat nya dalam memfasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah	RF.25.33.02.15	Kepala Bagian Hukum	Kurangnya koordinasi antar bidang / pegawai/ pejabat berwenang	Eksternal	C	Realisasi anggaran yang tidak teresap	Kepala Bagian Hukum
				Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.16	Kepala Bagian Hukum	Kurangnya koordinasi antar bidang / pegawai/ pejabat berwenang	Eksternal	C	Realisasi anggaran yang tidak teresap	Kepala Bagian Hukum
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.17	Kepala Bagian Hukum	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Kepala Bagian Hukum
7		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Pelaksanaan	Koordinasi permasalahan hukum yang tidak berjalan optimal	ROO.25.33.02.7	Kepala Bagian Hukum	Kurangnya koordinasi dalam Penyelesaian permasalahan hukum	Eksternal	C	Penyelesaian permasalahan hukum yang tidak tepat waktu	Kepala Bagian Hukum
				Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.18	Kepala Bagian Hukum	Adanya intervensi dalam proses verifikasi bukti untuk pelaporan	Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kepala Bagian Hukum
				Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.19	Kepala Bagian Hukum	Adanya intervensi dalam proses verifikasi bukti untuk pelaporan	Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kepala Bagian Hukum
8	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan	Pemahaman Pegawai/Staf terkait Kelengkapan dan Mekanisme Pengajuan Proposal Hibah Masih Kurang	ROO.25.33.02.8	Bag. Kesra	Kurangnya pemahaman mengenai pedoman kelengkapan dan mekanisme pengajuan proposal hibah	Internal	C	Terjadinya penurunan kinerja Pegawai / Staf	Bagian Kesra
				Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.20	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya koordinasi antar sub kegiatan / pegawai/ pejabat berwenang	Internal dan Eksternal	C	Realisasi anggaran yang tidak teresap	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.21	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah
9	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	Pemantauan dan Evaluasi	Proses mengidentifikasi laporan realisasi fisik dan keuangan membutuhkan kecermatan dan waktu relatif panjang	ROO.25.33.02.9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Kurangnya respon dalam penyampaian laporan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	Eksternal	C	Terlanjutnya sinkronisasi laporan realisasi fisik dan keuangan yang dihimpun	Bagian Adbang, Perangkat Daerah
				Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.22	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Kurangnya koordinasi antar bidang / pegawai/ pejabat berwenang	Eksternal	C	Realisasi anggaran yang tidak teresap	Bagian Adbang, Perangkat Daerah
				Tindak lanjut penyelesaian Laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.33.02.23	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Adanya intervensi teremi dalam proses verifikasi bukti untuk pelaporan	Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian Adbang, Perangkat Daerah
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.24	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian Adbang, Perangkat Daerah
10	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dapat ditindaklanjuti	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kesalahan Evaluasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa	ROO.25.33.02.10	Bagian PBJ	Poknil kurang hati hati dalam melakukan evaluasi pemilihan penyedia	Internal	C	Sanggahan/Pengaduan/Temuan APH	Bagian PBJ
				Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar.	RF.25.33.02.25	Bagian PBJ	Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi layanan di bidang perekonomian dan pembangunan	Internal dan Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian PBJ
				Spesifikasi Teknis Mengarah kepada produk/rekanan tertentu	RF.25.33.02.26	Bagian PBJ	Penyusunan Spesifikasi Teknis menyalahi aturan	Eksternal	C	Gagal Tender, Adanya Sanggahan dan Pengaduan	Bagian PBJ
				Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi	RF.25.33.02.27	Bagian PBJ	Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 dan perubahannya beserta aturan turunannya	Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian PBJ, Perangkat Daerah
				Terbatasnya calon penyedia pada etalase katalog lokal	RF.25.33.02.28	Bagian PBJ	Belum optimalnya pelaksanaan market sounding dan market confirmation pada etalase katalog lokal	Internal dan Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian PBJ, Perangkat Daerah
				Persiapan pemilihan penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi tanpa disertai referensi harga	RF.25.33.02.29	Bagian PBJ	PPK atau Pejabat Pengadaan tidak cermat dalam pelaksanaan persiapan pemilihan penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Purchasing Katalog melalui Metode Negosiasi	Internal	C	Harga beli yang ditetapkan di atas harga pasar, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian PBJ, Perangkat Daerah
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.30	Bagian PBJ	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian PBJ, Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaporan	Pengumpulan Laporan Triwulan TPID ke pusat terlambat dilaksanakan (Tahap Pelaporan)	ROO.25.33.02.11	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Monitoring TPID pada saat menjelang hari Raya terlambat dan belum optimal (ketersediaan dan harga Bahan Makanan Pokok)	Eksternal	C	Laporan Triwulan TPID dilaporkan tidak tepat waktu	1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah
				Perencanaan pembuatan Buku Evaluasi BUMD dan Buku Evaluasi BULD dengan pihak ketiga belum optimal (Tahap Perencanaan)	RF.25.33.02.31	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar 2. BUMD dan BULD 3. Pihak Ketiga
				Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar (Tahap Pertanggungjawaban)	RF.25.33.02.32	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
				PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.33	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi oleh pegawai dan rekanan	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar

## LAMPIRAN 4

Daftar Risiko Prioritas							Form 5
Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar						
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
a	b	c	d	e	f	g	
II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar						
	-	-	-	-	-	-	
III	Risiko Operasional OPD						
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar						
	-	-	-	-	-	-	

## LAMPIRAN 5

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)								Form 7
Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali							
Tahun Penilaian	: 2025							
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar							
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
a	b	c	d	e	f	g	h	
II	Risiko Strategis OPD							
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar							
	-	-	-	-	-	-	-	
III	Risiko Operasional OPD							
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar							
	-	-	-	-	-	-	-	

## LAMPIRAN 7

Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Pengendalian yang Dibangun								Form 8
Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali							
Tahun Penilaian	: 2025							
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar							
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
a	b	c	d	e	f	g	h	
II	Risiko Strategis OPD							
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar							
	-	-	-	-	-	-	-	
III	Risiko Operasional							
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar							
	-	-	-	-	-	-	-	

## LAMPIRAN 8

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan							Form 9
Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar						
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
No.	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
a	b	c	d	e	f	g	
II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar						
	-	-	-	-	-	-	
III	Risiko Operasional						
	Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar						
	-	-	-	-	-	-	

Denpasar, 2 Januari 2026

Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh  
Pj, Sekretaris Daerah Kota Denpasar



**Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680924 199303 1 010